

# **Post Islamisme Turki Studi Praksis Politik Adalet Ve Kalkinma Partisi (AKP)**

Oleh : Gili Argenti

Prodi Ilmu Pemerintahan, Universitas Singaperbangsa Karawang (UNSIKA)

Jalan HS. Ronggowaluyo Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang,

Jawa Barat, 41361 Indonesia

Email : gili.argenti@fisip.unsika.ac.id

## **ABSTRACT**

Political Islam in Turkey is considered by several circles to be the ideal form of Islamic political praxis in a democratic system. The socio-political phenomenon becomes an antithesis regarding the labeling that Islam cannot go hand in hand with democracy. The political praxis of post Islamism represented by the Adalet Ve Kalkinma Partisi (AKP) is proof that Islam is able to adapt and participate in a democratic system. Post Islamism is a new model of a political Islam group that is very aspirational with the values of openness, freedom and equality. This paper is a literature study on the political practices of AKP that take a pragmatic and non-ideological approach, so they are able to attract constituents from other communities outside their traditional groups. The post Islamism model developed by the AKP can be a reference for other political Islamic groups about how to adapt to a system of democratic systems that has become a global trend.

Keyword: Political Islam, Adalet Ve Kalkinma Partisi (AKP), Post Islamism.

## **ABSTRAK**

Islam politik di Turki dinilai beberapa kalangan merupakan bentuk ideal dari praksis politik umat Islam dalam sistem demokrasi. Fenomena sosial-politik tersebut menjadi sebuah antitesis mengenai pelabelan selama ini bahwa Islam tidak bisa beriringan dengan demokrasi. Praksis politik kalangan post Islamisme yang direpresentasikan Adalet Ve Kalkinma Partisi (AKP), menjadi bukti Islam mampu beradaptasi dan berpartisipasi dalam sistem demokrasi. Post Islamisme merupakan model baru dari kelompok Islam politik yang sangat aspiratif dengan nilai keterbukaan, kebebasan dan kesetaraan. Tulisan ini merupakan sebuah studi kepustakaan mengenai praksis politik AKP yang menempuh pendekatan pragmatis dan non-ideologis, sehingga mampu menarik konstituen dari komunitas lain diluar kelompok tradisionalnya. Model post Islamisme yang dikembangkan AKP ini bisa menjadi rujukan kelompok Islam politik lain mengenai bagaimana beradaptasi dalam sistem demokrasi sebuah sistem yang telah menjadi trend global.

Kata Kunci : Islam politik, Adalet Ve Kalkinma Partisi (AKP), Post Islamisme

## PENDAHULUAN

Dalam studinya M. Muhsin Jamil (2005:119-120), membagi gerakan Islam politik di dunia menjadi dua bentuk gerakan. *Pertama*, gerakan politik partisan yang berusaha menempuh jalur politik resmi, bersinergi secara baik dengan cara melakukan lobi-lobi politik dan kekuasaan. Termasuk dalam gerakan politik partisan ini diantaranya partai Islam dan organisasi massa Islam. *Kedua*, gerakan sosial yang lebih menekankan proses Islamisasi dengan menciptakan basis-basis sosial baru demi penegakan syariat Islam di tengah-tengah masyarakat, umumnya mereka tidak menggunakan mekanisme sistem demokrasi dalam memperjuangkan agenda politiknya, mereka bergerak diluar sistem pemerintahan dengan membentuk berbagai komunitas-komunitas Islam. Gerakan yang pertama berorientasi kepada terciptanya tatanan politik dan kekuasaan berdasar spirit serta nilai substansi Islam dalam konteks sistem demokrasi, sedangkan gerakan kedua bertujuan untuk membentuk dukungan sosial bagi masyarakat yang Islami, menyatukan secara sempurna antara agama dan negara, dengan merujuk penciptaan tatanan sosial seperti masa keemasan peradaban Islam (*Islamic golden age*).

Pasca musim semi demokrasi di Timur Tengah Islam politik yang awalnya diharapkan banyak kalangan akan memberikan kontribusi besar dalam pembangunan politik dan demokrasi mengalami kegagalan, partai-partai Islam yang didirikan terbukti tidak mampu beradaptasi dengan iklim demokrasi, konflik politik dengan kelompok nasionalis-sekuler tidak berujung pada konsensus politik. Padahal sistem demokrasi merupakan sistem politik yang membuka ruang cukup lebar untuk terjadinya konsensus atau kompromi, ketika konflik politik terjadi. Justru di beberapa negara Timur Tengah konflik politik itu tidak menemukan titik temu, konflik menaun akhirnya mengundang militer melakukan intervensi berupa aksi kudeta. Tetapi, sikap pesimis dan kecewa akan terobati, ketika melihat perkembangan Islam politik di negara Turki, dimana Islam politik dapat beriringan dengan konsep demokrasi sekuler barat.

Dunia Islam saat ini dikejutkan dengan fenomena AKP (*Adalet Ve Kalkinma Partisi*) di Turki yang berkali-kali memenangkan pemilu di negara sekuler tersebut. Menurut Ahmad Dzakirin (2012:76-77), AKP merupakan partai yang didirikan

kalangan Islamis Turki, meskipun didirikan dengan spirit kebangkitan Islam, partai ini di desain sebagai partai terbuka dan modern, bahkan AKP menerima nilai-nilai sekularisme dengan interpretasi baru. Sekulerisme menurut AKP dipahami bukan menegasikan (memusuhi) agama, sekulerisme AKP ini mirip yang dipraktikkan negara Amerika Serikat, dimana negara menjamin kebebasan setiap individu dalam mengekspresikan keyakinan agama, negara tidak turut campur mengurus keyakinan agama warga negaranya, tetapi negara juga tidak menjadikan agama sebagai musuh yang harus dikurangi peran sosialnya dimasyarakat.

Konsep sekulerisme AKP (dalam Syarif Taghian, 2011:45), memberikan definisi baru dengan menjaga agama, menjamin kebebasan menjalankan agama bagi tiap-tiap warga negaranya. Menurut Erdogan, salah seorang pendiri AKP, partai yang dipimpinya bukan partai Islam, tetapi partai moderat yang senantiasa menjaga demokrasi, tidak memfokuskan pada dasar-dasar agama maupun kesukuan, AKP menurutnya merupakan partai yang terbebas dari pendekatan-pendekatan ideologis. Sedangkan Arya Sandhiyudha (2013), salah satu kesuksesan AKP ialah kemampuan partai ini membumikan nilai-nilai Islam secara elegan, AKP tidak menjual simbol-simbol keagamaan kepada masyarakat Turki, seperti mengampanyekan isu syari'at Islam. Program politik AKP lebih mengangkat isu-isu bersifat solutif dari permasalahan yang dihadapi masyarakat, jargon-jargon ideologis "Islamis" sudah ditinggalkan AKP. Sehingga banyak pengamat Islam politik, menyebutkan AKP telah membawa "gerbong baru" dalam politik Islam kontemporer, yaitu gerbong post Islamisme.

Menurut Ahmad Dzakirin (2012) post Islamisme adalah pemikiran serta gerakan politik yang tidak lagi memperjuangkan formalisasi syariat Islam ke dalam ideologi negara, tetapi mengaplikasikan nilai Islam kedalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Formalisasi syariat Islam (negara Islam) bukan menjadi tujuan dari gerakan ini, tujuan utama post Islamisme adalah mensejahterakan masyarakat serta mencari solusi dari problem-problem yang muncul di masyarakat. Wacana post Islamisme merupakan salah satu bukti bahwa telah terjadi pergeseran orientasi Islam politik dinegara tersebut. Solusi Islam yang mereka tawarkan tidak lagi berdimensi simbolis-ideologis, tetapi bersifat substansi-pragmatis. Program politik kelompok Islam di Turki yang terepresentasikan AKP, menjadi salah satu tema yang menarik

untuk dikaji, karena selama ini terdapat tesis dari ilmuwan sosial-politik Barat, yang mengatakan bahwa Islam tidak bisa beriringan dengan konsep demokrasi. Wajah politik di Turki tentunya meruntukan pendapat itu, negara dengan penduduk mayoritas Islam, AKP mampu membuktikan bahwa Islam sejalan serta selaras dengan demokrasi. Tulisan ini ingin menjelaskan konsep politik post Islamisme yang dikembangkan AKP, melalui orientasi ideologi serta program politik yang mereka tawarkan dan laksanakan. Selain itu post Islamisme AKP, diharapkan bisa menjadi model baru relasi Islam politik dengan demokrasi yang ideal, ditengah kegagalan kelompok-kelompok Islam politik di Timur Tengah dalam membangun hubungan yang baik dengan sistem demokrasi.

Berdasarkan pendahuluan diatas, ada pertanyaan pokok yang menjadi fokus dalam tulisan ini :

1. Bagaimana langkah pragmatisme politik yang dilakukan kelompok post Islamisme di Turki (AKP) ketika menghadapi realitas politik yang heterogen?
2. Bagaimana strategi non platform ideologis kelompok post Islamisme di Turki (AKP) ketika menghadapi pemilihan umum?

## **KERANGKA TEORI**

Post Islamisme merupakan terminologi baru untuk menggambarkan sebuah fenomena dalam gerakan Islam politik, berupa keikutsertaan serta berpartisipasi mereka ke dalam sistem politik modern, yang sebelumnya mereka anggap sebagai sistem politik yang tidak Islami. Partisipasi politik mereka dalam politik modern itu berupa peningkatan hak suara dalam pemilu, afiliasi terhadap partai politik tertentu, bahkan bisa pula membentuk partai politik baru. Artinya telah terjadi perubahan paradigma dan gerakan politik Islam dikalangan umat Islam, dari garis keras, militan, eksklusif, dogmatis, ke arah paradigma dan gerakan yang menghargai inklusivitas, pluralitas dan toleransi.

Post Islamisme merupakan antitesis wacana Islamisme, paradigma kelompok moderat ini memiliki prinsip melakukan reformasi bidang ekonomi dan demokrasi, tanpa mengubah dasar ideologi negara, dengan tetap mengakui dan menghormati nilai-nilai keragaman bernegara. Isu formalisasi syari'at Islam nyaris tidak

digaungkan sebagai prinsip perjuangan politik, kelompok post Islamisme menawarkan isu politik yang lebih populis seperti perbaikan pelayanan publik, anti korupsi, peningkatan kualitas hidup masyarakat dan kesetaraan gender.

Post Islamisme berbeda dengan Islamisme (dalam Anthony Bubalo, Greg Fealy, Whit Mason, 2012: 73-74) untuk yang kedua senantiasa mengaitkan kemunduran dunia Islam saat ini dengan kurangnya komitmen menjalankan ajaran Islam secara ketat, dalam hal ini kalangan Islamis melihat Islam sebagai sebuah ideologi dan basis gerakan untuk melakukan reformasi masyarakat secara menyeluruh, dengan menolak nilai-nilai dunia Barat, serta memperjuangkan formalisasi syari'at Islam dalam kehidupan bernegara. Sedangkan menurut Bassam Tibi (2016:7), terdapat isu-isu mendasar yang selalu diusung kelompok Islamisme. *Pertama*, interpretasi Islam sebagai sistem tatanan negara. *Kedua*, persepsi akan Yahudi sebagai musuh utama yang berkonspirasi melawan Islam. *Ketiga*, evolusi dari jihad klasik ke jihadisme teroris. *Keempat*, kemurniaan pandangan Islam akan penolakan atas sekulerisme.

Menurut Asef Bayat (2011), post Islamisme bercirikan serangkaian gerakan sosial dan intelektual yang digerakan oleh generasi muda, mahasiswa, perempuan dan intelektual agama, dengan mengkompromikan iman dengan kebebasan, agama dan HAM, atau mentransendenkan pemerintahan Islam dengan mensyaratkan adanya kebebasan atas pilihan individu, pluralisme dan etika agama. Gerakan post Islamisme berawal dari gerakan reformasi di negara Islam Iran, seiring kemenangan kelompok reformasi di bawah Presiden Khatami. Gerakan post Islamisme di Iran ditunjukkan dengan trend terbukanya ruang publik kota yang bebas dan modern, pembentukan karakter kota ditunjukkan estetika baru dengan konfigurasi ruang, simbolisasi komersialisme yang besar dan mall-mall menyerupai kota Madrid atau Los Angeles. Slogan-slogan Revolusi Islam sebelumnya mendominasi hiasan kota, tergantikan dengan poster-poster bersifat komersil, dipusat kota juga didirikan pusat-pusat budaya yang menyediakan kesenian-kesenian, musik dan teknologi modern. Selain terbukanya ruang publik kota, gerakan post Islamisme banyak digerakan oleh para pemuda dan mahasiswa, mereka mengasosiasikan diri dengan sifat idealisme, individualisme dan spontanitas, dengan menciptakan model pemahaman keberagaman yang komprehensif antara iman, kebebasan dan kesenangan.

Menurut Sitaresmi Soekanto (2016:212) post Islamisme adalah sebuah paham tentang kembali kepada prinsip-prinsip orisinal agama Islam, yang juga sama-sama mengajurkan *Syumuliyatul Islam* yakni ajaran agama Islam meliputi semua aspek kehidupan. Post Islamisme juga merupakan gerakan global menekankan aspek substantif sehingga menganggap *clean government* dan *good governance* merupakan perwujudan nilai-nilai kebaikan dalam Islam yang universal. Post Islamisme mengusung konsep masyarakat madani, kelompok ini menekankan secara implisit pesan-pesan moral Islam melalui moralitas yang ditunjukkan oleh para aktifisnya, serta mengusung sikap inklusif dan toleran terhadap perbedaan serta keragaman yang terdapat dimasyarakat.

Menurut Wan Ahmad Fahmi (2016), post Islamisme merupakan trend terbaru yang timbul dalam gerakan Islam politik global, kemunculannya selaras dengan tuntutan untuk memenuhi kehendak demokrasi. Sebelum kemunculan post Islamisme, menurutnya gerakan Islam politik mengadopsi ideologi Islamisme, yaitu gerakan politik yang berkehendak membentuk pemerintahan dengan tafsiran Islam yang *holistik*, sedangkan post Islamisme merupakan sebuah strategi baru dari kelompok Islam politik untuk bisa melangsungkan keberadaannya, dengan cara menempuh perubahan strategi gerakan dari idealisme negara Islam kepada ide politik Islam yang lebih realistis-pragmatis. Kelompok post Islamisme menyatakan diri bahwa ideologi tidak lagi penting, bagi mereka pengamalan corak pemerintahan *autokrasi* tidak banyak memberi manfaat kepada sistem ekonomi, sosial kemasyarakatan dan pembangunan negara. Perlu adanya langkah berbeda dalam melaksanakan pemerintahan dengan penciptaan ruang sosial terbaru yang sesuai dengan budaya masyarakat. Bagi post Islamisme penciptaan ruang sosial baru ini dapat dipraksiskan oleh gerakan Islam politik dengan cara melakukan penghormatan yang tinggi terhadap keadilan, demokrasi dan hak asasi manusia.

Post Islamisme menurut Wasisto Raharjo Jati (2017:78-79) bentuk adaptasi dan akulturasi nilai modernis dengan Islam. Menurutnya post Islamisme merupakan fenomena kritik terhadap berbagai kemunduran pembangunan masyarakat muslim yang dilakukan oleh kelompok-kelompok Islam formalis. Gerakan politik post Islamisme memperjuangkan transformasi dari pembentukan negara Islam ke pembentukan sikap atas kesalehan sosial secara individu atau kolektif, sikap atas

humanitarian dan deradikalisasi agama. Post Islamisme sendiri merupakan antitesis dari pembangunan masyarakat ala *salafi* yang tidak menghendaki modernitas atau kemajuan, dengan kata lain post Islamisme menekankan pembangunan kepada masyarakat muslim yang berbasis pada tiga aspek, yaitu (1) menekankan hak dari pada kewajiban. (2) pro terhadap pluralitas dari pada otoriter dan (3) lebih melihat masa depan dari pada masa lalu. Gagasan utama post Islamisme sendiri menekankan sinergitas Islam dengan modernitas, demokrasi dan pluralisme. Memaknai post Islamisme dalam kaitannya dengan wacana Islam politik lebih dikaitkan dengan upaya membentuk wajah Islam yang inklusif dan adaptif sesuai dengan kebutuhan zaman. Diseminasi post Islamisme sendiri sebenarnya untuk melakukan perlawanan terhadap ortodoksi yang menginginkan pembentukan negara Islam.

Dari paparan diatas tentang post Islamisme dapat disimpulkan beberapa dimensi teori, diantaranya : *Pertama*, bersikap pragmatis, realistis, serta kesediaannya untuk berdamai dengan realitas politik yang ada saat ini, realitas yang tidak sepenuhnya ideal dan sebangun dengan cita-cita ideologis. Post Islamisme sama sekali tidak sekular, bahkan tetap menunjukkan sentimen negatif kepada setiap bentuk sekularisme, tetapi dia juga menolak teokrasi dan penerapan platform ideologis-keagamaan. *Kedua*, kecenderungan yang kompromistik dengan kenyataan politik. Adanya proses adaptasi yang mendorong beberapa gerakan Islamis mampu menjadi kekuatan alternatif bagi permasalahan demokratisasi di negara-negara muslim.

## **METODE PENELITIAN**

Penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif dalam tulisan ini, sebuah metode menganalisis data ditunjukkan atau disajikan bukan dalam bentuk statistik, tetapi berupa menggambarkan atau menarasikan suatu fenomena politik yang terjadi. Penulis juga menggunakan data kepustakaan, yaitu data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek kajian yang sedang diteliti. Seperti buku, koran, artikel dan jurnal.

Untuk proses mengolah data yang diperoleh, penulis menggunakan beberapa tahapan. *Pertama*, dalam pengumpulan data ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan data dari literatur dengan cara menelaah isinya melalui buku-buku, catatan, manuskrip dan dokumen-

dokumen yang ada. *Kedua*, menguji dan menganalisa data secara kritis, dengan kritik ini diharapkan dapat mendapatkan validitas sumber data (baik sumber primer, sumber sekunder, sumber sejarah dan sumber teoritik) yang digunakan dalam penelitian. *Ketiga*, menghubungkan peristiwa yang satu dengan peristiwa lain sehingga menjadi satu rangkaian politik yang utuh.

## **PEMBAHASAN**

### **I. Sejarah AKP (*Adalet Ve Kalkinma Partisi*)**

Kelahiran AKP dalam panggung politik nasional Turki tidak bisa dilepaskan dari peristiwa kudeta militer terhadap kemenangan Partai Kesejahteraan (Refah Partisi) ditahun 1997. Partai Refah didirikan cendikiawan muslim “Bapak Pergerakan Islam” Necmettin Erbakan pada tahun 1981, partai ini didukung oleh kalangan ulama, ilmuwan, industrialis dan masyarakat Turki.

Menurut Asep Syamsul M. Romli (2000:80), sebelum mendirikan Partai Refah pada tahun 1970, Erbakan mendirikan Partai Sistem Nasional (SN). Karena dianggap membahayakan sistem sekuler Turki, penguasa kemudian membubarkan partai ini. Dua tahun kemudian, Erbakan kembali mendirikan partai politik yang bernama Partai Keselamatan Nasional (PKN), partai inipun mengalami nasib sama dengan Partai Sistem Nasional yang dibubarkan penguasa sekuler, bahkan Erbakan sendiri masuk penjara, karena dianggap mengecam sekulerisme Turki. Dalam program politiknya PKN sangat kental sebagai partai Islam dengan menjadikan spirit *Khilafah Islamiyah* sebagai warisan nasional bangsa Turki yang harus direbut kembali.

Necmettin Erbakan tentu tidak bisa dilepaskan sebagai simbol kelompok Islamisme di Turki saat itu, ia merupakan pendiri dari Gerakan Pandangan Nasional (*Milli Gorus Hareketi*) pada tahun 1960-an. Kelompok *Milli Gorus* ini memiliki banyak karakteristik yang sama dengan gerakan Islamis lain di dunia, yang senantiasa mengaitkan kemunduran dunia Islam akibat dari kurang komitmennya umat Islam terhadap agamanya, serta tidak menjadikan Islam sebagai pedoman hidup dalam bernegara. Mereka juga memandang Islam sebagai ideologi serta basis untuk melakukan perubahan di masyarakat secara menyeluruh. Pendukung kelompok *Milli Gorus* umumnya berasal dari mahasiswa, para pedagang dan kelas menengah saleh yang selama ini tidak terwakili oleh partai-partai sekuler



Kehadiran *Milli Gorus* dalam panggung politik Turki yang melahirkan Partai Refah, diawali ketika ditutupnya madrasah dan sekolah keagamaan di Turki pada tahun 1924 oleh rezim sekuler. Peristiwa ini mengakibatkan banyak pemuda-pemudi Turki pergi ke Mesir untuk menempuh pendidikan agama, terutama pendidikan agama di Universitas Al-Azhar, setelah mereka lulus, mereka kemudian kembali mengambil peran sebagai "*transmitter*" gerakan Islam politik di Turki. Selama mereka kuliah di Mesir, para mahasiswa Turki ini bersentuhan dengan pemikiran Ikhwanul Muslimin (IM), maka tidak heran ditahun 1960-an, karya terjemahan penulis orisinil IM banyak diterbitkan di Turki. Misalnya karya Hasan Al-Banna mulai diterjemahkan dan diterbitkan, juga karya terjemahan Sayyid Qutb. Serta tidak dapat dinafikan bahwasanya karya-karya Al-Banna dan Qutb sangat mempengaruhi generasi muda yang menjadi pendukung dan anggota *Milli Görüs Harekati*. Erbakan muncul sebagai saluran penting dari Ikhwanul Muslimin ke Turki. Erbakan sangat terinspirasi oleh tulisan-tulisan Sayyid Qutb, khususnya tulisan tentang seruan Quthb untuk pendidikan pedesaan dalam rangka untuk mengatur dirinya sendiri dan secara bertahap mendapatkan kontrol pemerintahan dari elit perkotaan (<https://www.quareta.com/post/erdogan-akp-dan-ikhwanul-muslimin>, diakses 1 September 2017).

Pada tahun 1995 Partai Refah menjadi pemenang pemilu nasional, sehingga mengantarkan Necmettin Erbakan menjadi Perdana Menteri (PM) Turki, saat menjadi perdana menteri Turki, Erbakan berusaha mengembangkan hubungan baik dengan negara-negara Arab, agar kesejahteraan ekonomi negara-negara Arab itu dapat dikembangkan pula ditengah masyarakat Turki. Selain itu, pemerintahan Turki berusaha untuk melaksanakan pendekatan politik multi dimensional dengan negara-negara tetangga. Pandangan politik luar negerinya memiliki dua pilar, hubungan kerja sama yang erat dan persatuan diantara negara-negara Islam. Langkah persatuan diantara negara-negara Islam diwujudkan dengan mendirikan *Developing Eight D-8* yang bertujuan membentuk persatuan ekonomi dan politik yang kuat, dengan anggota Turki, Iran, Malaysia, Indonesia, Mesir, Bangladesh, Pakistan dan Nigeria

Menurut Syahrul Hidayat (2015:19-20), Partai Refah dibawah Erbakan menawarkan program-program yang diharapkan mampu mengatasi berbagai persoalan-persoalan yang dihadapi oleh Turki, diantaranya : *Pertama*, mewujudkan

pemerintahan yang bersih (*clean government*), program ini merupakan refleksi dari kekecewaan rakyat Turki terhadap sistem pemerintahan Turki yang korup. *Kedua*, menerapkan sistem ekonomi keadilan (*just economic system*) dengan menawarkan sistem ekonomi perbankan tanpa bunga yang mereka nilai tidak berdimensi keadilan. *Ketiga*, mengurangi peranan barat (*reduce the west role*) dengan menyatakan ketidakminatan mereka untuk bergabung dalam Masyarakat Eropa (*European Community*) sekaligus mencabut permohonan yang telah diajukan pemerintahan sebelumnya, selain itu partai ini mendorong pembentukan lembaga seperti PBB yang khusus bagi negara-negara Islam. *Keempat*, memberantas kemaksiatan dan mengakhiri sekulerisasi untuk diganti dengan Islamisasi.

Melihat haluan politik Erbakan yang dinilai memiliki agenda Islam, maka pihak militer bersama kelompok sekuler menekan Erbakan untuk mundur dari jabatannya, bahkan Partai Refah melalui pengadilan berhasil dibekukan oleh Mahkamah Konstitusi, karena dianggap mempromosikan Islam fundamentalis di Turki. Sebelum dibekukan, pada tanggal 23 November 1997, Erbakan membacakan pidato pembelaan terkait tuduhan dari pihak militer tersebut, dia menolak tuduhan bahwa Partai Refah mengabaikan konstitusi negara sekuler dan hendak mengubah Turki menjadi negara Islam. Pembelaan Erbakan ini tidak berpengaruh banyak.

Setelah pembubaran Partai Refah pada bulan Januari 1998 menurut Alfian Alfian (2015:64-65), para pendukung Islam politik di Turki berinisiatif untuk mendirikan partai baru, yaitu Partai Kebaikan (*fazilet partisi*). Terdapat hal menarik dari kelahiran Partai Kebaikan ini, kehadirannya ternyata disertai hadirnya dua fraksi penting dalam tubuh partai, antara faksi reformis (*yenilkciler*) dan faksi tradisional (*gelenkciler*). Kelompok reformis menekankan pentingnya regenerasi baru dalam kepemimpinan partai, diantara tokohnya diantaranya Abdullah Gul, Melih Gokcek dan Recep Tayyip Erdogan. Namun faksi ini terpinggirkan, karena kelompok tradisional yang dipimpin oleh Recai Kutan mendominasi kepengurusan partai. Tetapi umur Partai Kebaikan ini tidak bertahan lama, pada tanggal 22 Juni 2001, partai ini dibubarkan pemerintah dengan tuduhan membahayakan ideologi sekuler Turki. Setelah Partai Kebaikan dibubarkan kelompok Islam politik Turki mengalami perpecahan, faksi tradisional mendirikan Partai Kebahagiaan (*Saadet Partisi*),

sedangkan faksi reformis mendirikan AKP (*Adalet Ve Kalkinma Partisi*) dibawah kepemimpinan Erdogan.

## **II. Ideologi AKP (*Adalet Ve Kalkinma Partisi*)**

Menurut Erdogan (dalam Syarif Taghian, 2011:18) partainya bukanlah partai keagamaan melainkan partai yang menjaga kebersamaan, dia menjelaskan bahwa AKP tidak mengeksploitasi isu agama demi ambisi politik meraih kekuasaan, baginya partai AKP mengikuti arah politik yang jelas untuk mencapai tujuan politik yang telah dicanangkan oleh Attaruk, yaitu mendirikan masyarakat yang berbudaya modern dalam keIslaman. AKP selalu berpihak kepada keputusan orang banyak serta tidak menginginkan perselisihan dengan militer Kemalis. AKP memiliki keyakinan bahwa sistem demokrasi bisa kompatibel dengan umat Islam, istilah muslim-demokrat atau religius-demokrat lazim diletakan dengan partai ini. Tetapi AKP tidak seperti kaum Islamis lain yang memiliki visi untuk mendirikan pemerintahan syariat atau merestorasi kembali sistem kekhalifahan, mereka melihat kehidupan politik dengan kaca mata pragmatis. Dalam konteks inilah, AKP sebagai fenomena post Islamis, mengklaim diri serupa dengan Partai Uni Demokrat Kristen (*Christlich Demokratische Union Deutschlands*, CDU) di Jerman dan Partai Republik di Amerika Serikat.

AKP mengidentifikasi dalam dirinya sebagai partai konservatif demokrat. Istilah konservatif ini tidak harus diasosiasikan sebagai partai politik yang memiliki agenda untuk menjauhkan diri dari kebijakan progresif. Konservatif yang dimaksudkan AKP tidak lebih sebagai upaya mentaati nilai-nilai spiritual keagamaan, tetapi dengan tetap menghargai perubahan (Miftahul Amin, 2014: 150-151). Artinya ideologi AKP berada pada posisi ekspektasi perbaikan kesejahteraan sosial serta pertumbuhan ekonomi yang kemudian menggabungkannya dengan ketertiban moral, tradisional dan religiusitas. Intinya AKP (dalam Sitaresmi S. Soekanto, 2016:120) merupakan partai politik yang secara formal tidak menyebut dirinya sebagai partai Islam, namun secara substantif nilai-nilai Islam tercermin dalam kebijakannya. Pidato Erdogan yang mengutip hadist Nabi Muhammad SAW : “*sayyidul qaumi khadimuhum*” yakni pemimpin suatu negara adalah pelayan bagi rakyatnya. Aplikasi spirit keIslaman ini membuat AKP terkategori sebagai partai post Islamis yang mencita-citakan masyarakat diilhami nilai-nilai Islam, tetapi tidak memaksakan

berdirinya negara Islam. Partai AKP secara tegas menolak dimasukan sebagai partai agama, tetap saja kalangan sekuleris Turki, mereka sering melemparkan isu bahwa Erdogan bersama AKP memiliki agenda-agenda politik tersembunyi akan mendirikan negara berasas agama seperti di Iran. Erdogan dengan tegas membantah semua hal itu, dengan berkata AKP tidak akan mengubah prinsip-prinsip dasar negara, program politik AKP akan fokus melakukan reformasi dibidang ekonomi dan demokrasi, serta AKP sangat menghormati nilai-nilai kenegaraan republik dan sekulerisme.

### **III. Relasi Gerakan Gulen Dengan AKP (Adalet Ve Kalkinma Partisi)**

Terdapat dua gerakan Islam terpopuler di Turki saat ini, yaitu *Gulen Movement* dan *Milli Gorus*. Kedua gerakan ini mengambil jalan berbeda. Milli Gorus gerakannya fokus mengambil jalan Islamisme politik, yang kemudian banyak melahirkan partai-partai Islam diantaranya Partai Refah, sedangkan fokus gerakan Gulen lebih memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Gerakan Gullen (dalam Muhammad Pizaro, Harian Republika, Tanggal 21 Juli 2016) merupakan gerakan sosial yang terinspirasi pemikiran Islam moderat dari Muhammad Fethulleh Gullen atau akrab disapa *Hocaefendi* oleh para pendukungnya. Fethulleh Gulen lahir di Korucuk, Erzurum wilayah Turki bagian Timur pada 11 November 1938, sejak belia beliau sudah menghafal Al-Qur'an serta belajar ilmu agama disejumlah madrasah. Ia juga menimba ilmu keIslaman dari beberapa ulama besar, salah satunya Osman Bektasi, seorang ahli fikih paling terkemuka dimasanya, dari gurunya ini, Gulen mempelajari ilmu *nahu*, *balaghah*, *fikih*, *ushulul fiqh* dan *akaid*. Sosok Gulen bisa diterima diberbagai lapisan masyarakat serta agama, karena pemikirannya moderat, sehingga mampu menjadi penyeimbang para pemikir Islam yang dianggap ekstrem dan radikal. Hal menarik lain, Fethulleh Gulen tidak menolak sekulerisme, tetapi baginya Turki sekuler tidak boleh menghalangi kemajuan dunia Islam, Gulen banyak menuangkan pemikiran tentang pembaharuan dunia Islam, ia mengedepankan dialog serta perdamaian antar sesama umat beragama dalam menyebarkan ajaran dan nilai-nilai Islam. Pemikiran-pemikirannya ini kemudian menginspirasi pengikutnya dalam mewujudkan lembaga-lembaga pendidikan, lembaga amal, media massa baik cetak dan elektronik.

Fethulleh Gulen menurut Zulfahmi (2014:70-71) memiliki corak pemikiran menggabungkan agama dengan ilmu pengetahuan, tradisional dengan modernitas, spiritual dengan intelektual, rasio dengan wahyu, serta akal pikiran dengan hati. Gulen mengkritik pandangan hidup materialis, ia menegaskan bahwa harmoni sosial dengan alam, serta dengan manusia dapat diraih jika materi dan spiritual dapat dipadukan. Menurut Gulen, agama dapat menjadi benteng pencegah kehancuran yang ditimbulkan oleh materialisme sains, baginya sains harus ditempatkan pada tempatnya yang tepat. Pemikiran Gulen lainnya, ia tidak mengusung kembali kepada masa lalu yang mengagungkan romantisme masa awal Islam, tetapi menyegarkan modernitas dengan nilai-nilai tradisional. Beliau memimpikan generasi muda yang akan mengkombinasikan pencerahan intelektual dengan spiritual murni, kebijaksanaan dan aktifisme yang berkesinambungan. Salah satu keyakinan Gulen adalah bahwa jika umat Islam ingin menguasai peradaban dunia, maka jangan pisahkan mereka dari ilmu pengetahuan, sebab hanya melalui ilmu pengetahuan tirani kebatilan dapat digulingkan.

Menurut Muhammed Cetin (2013), gerakan Gulen atau Hizmet ini memiliki beberapa karakteristik gerakan diantaranya : *Pertama*, gerakan Gulen secara sistematis telah menghindari tindakan bermusuhan (konfrontasi) politik dengan militer sekuler, gerakan ini mengambil tindakan non kekerasan secara prinsip dan praktis, dengan menerima sekulerisme Turki, serta tidak mempromosikan sistem politik *Khilafah Islamiyah*. Pencerahan Gulen menghendaki terbentuknya keterbukaan informasi diruang publik, dengan tujuan merevitalisasi proses demokrasi partisipatoris dengan upaya konstruktif untuk menarik individu dan kelompok agar berkolaborasi dalam membangun semangat pelayanan publik. *Kedua*, gerakan Gulen membuat kondisi modern menjadi lebih bermakna melalui percampuran yang mendalam antara pemikiran konservatif dan toleransi liberal. Kelompok Hizmet ini mendorong reintegrasi simbolik untuk melakukan penyembuhan atas kerusakan dan menata kembali dunia. *Ketiga*, kesukarelaan menjadi dimensi penting dari gerakan pencerahan Gulen. Individu dengan bebas bisa bergabung dengan asosiasi atas pilihan mereka sendiri, serta mereka juga bebas keluar tanpa dipungut biaya sedikitpun.

Fethulleh Gulen memiliki hubungan baik dengan Erdogan, bahkan dibulan Februari tahun 2000, koran *Zaman* media milik Hizmet mempublikasikan pandangan politik Erdogan, isinya menjelaskan sikap politik Erdogan yang mengadopsi sekulerisme pasif, bahkan dalam koran itu dijelaskan bahwa Erdogan merupakan penerus Islam politik Erbakan. Menariknya meski memiliki kaitan politik dengan Erbakan, pemikiran politik Erdogan dan AKP sebenarnya lebih dekat dengan ide-ide pembaharuan moderat Gulen yang tidak memusuhi dunia barat serta menerima nilai-nilai sekulerisme Turki.

Hubungan antara Gulen dengan Erdogan mengalami perpecahan setelah tahun 2013, ketika itu Erdogan dan AKP menuding Gulen serta Hizmet merancang tuduhan korupsi yang menjerat sejumlah pejabat senior AKP dan putra Erdogan. Menyusul dugaan kasus korupsi itu, pemerintahan Erdogan kemudian melakukan pembersihan untuk menyingkirkan para pendukung Gulen dari posisi kemiliteran, polisi dan kehakiman. Bahkan para jurnalis dan media massa yang diduga memiliki keterkaitan dengan Gulen juga menjadi sasaran. Perpecahan kembali meruncing terkait resolusi konflik antara Turki dengan suku Kurdi (PKK), kelompok Gulen mendukung gagasan membuka diri serta dialog terhadap PKK, namun ia keberatan mengenai kebijakan Erdogan tentang hal ini. Gulen cenderung pada gagasan rekonsiliasi politik, namun di sisi lain Erdogan membuat konsesi yang tidak perlu dengan PKK, yang akan mendorong kelompok tersebut untuk melanjutkan propagandanya dan semakin menolak untuk menarik diri dari wilayah Turki. Kemudian perbedaan sikap Fethullah Gulen dengan Erdogan, kembali terjadi, ketika perahu *Mavi Marmara* yang berbendera Turki tergabung dalam *Freedom Flotilla* berlayar ke Gaza dalam rangka menembus barikade Israel pada tahun 2010. Gulen menyatakan bahwa pihak penyelenggara (termasuk negara pendukungnya) harus berkoordinasi dan tunduk dengan kekuatan dan aturan pemerintahan lokal, hal ini mereferensikan pada Israel dan bukan pada pemerintahan Gaza. Hal ini sejalan dengan filosofi Gulen yang menyatakan bahwa tidak ada yang berhak bekerja diluar kerangka kekuatan penguasa lokal (<http://internasional.kompas.com/read/2016/07/19/11591911/fethullah.gulen.bekas.sekutu.yang.menjadi.musuh.erdogan?page=all> , diakses 12 Agustus 2017)

Peseteruan AKP dengan Gerakan Gulen mencapai puncaknya ketika kegagalan kudeta militer tahun 2016, Erdogan dan AKP menuding Gulen sebagai aktor dibelakang layar merencanakan aksi kudeta yang gagal tersebut. Pasca kegagalan kudeta militer, kelompok Gulen (Hizmet) mengalami tekanan sistematis dari pemerintahan Erdogan, bahkan Erdogan memasukan Hizmet sebagai salah satu kelompok teroris yang sama berbahanya dengan kelompok negara Islam Iraq dan Suriah (ISIS). Menariknya tidak hanya Erdogan yang meyakini Hizmet sebagai gerakan berbahaya bagi Turki, seorang intelektual Islam Moderat Mustafa Akyol yang selama ini kerap mengkritik Erdogan menyakini hal sama, dalam artikelnya berjudul *Should Gulen Face Trial For Turkish Coup Attempt?*, ia menjelaskan kebenaran teori persekongkolan kudeta. Mustafa Akyol menjelaskan gerakan Gulen yang memiliki ratusan ribu anggota ini, ternyata mempercayai sosok Gulen memiliki sejumlah bimbingan serta kearifan keTuhanan. Pengikut gerakan Hizmet menyakini Gulen sebagai seorang yang terpilih (Imam Mahdi), kepercayaan ini menjadikan komunitas Gulen menjadi sangat ketat dengan ketaatan penuh kepada Gulen, tidak ada ruang sedikitpun untuk perbedaan pendapat, apalagi melakukan kritik. Bagi Mustafa Akyol, sekiranya pengikut Gulen hanya semata-mata membangun sekolah, lembaga-lembaga amal dan organisasi LSM tentu tidak ada masalah, pengikut Gulen justru menurutnya sedang membangun struktur kendali birokrasi atas negara. Terakhir dalam tulisannya Akyol sangat mendukung Fethulleh Gulen dihadapkan ke meja pengadilan (Ahmad Syafii Maarif, *Erdogan Vs Gulen : Bencana Politik Bagi Turki Bagian II*, Harian Umum Republika, Tanggal 9 Agustus 2016).

#### **IV. Pragmatisme Politik Dan Strategi Non Platform Ideologis**

Semenjak dideklarasikan AKP mengklaim diri bukan sebagai partai Islam, tetapi partai konservatif demokrat. Dengan mendeklarasikan diri sebagai partai kanan tengah, AKP membuat demarkasi perbedaan yang jelas dengan partai-partai Islam pendahulunya. Partai yang didirikan Erdogan ini, ingin menjadi wadah yang bisa menampung berbagai kelompok sosial di Turki, seperti para konservatif taat, kelompok nasionalis, reformis liberal dan pebisnis yang beriman.

Selama enam belas tahun AKP berhasil menancapkan kekuasaan politiknya di Turki, tercatat beberapa keberhasilan yang telah dicapai partai ini. Di tahun pertama kekuasaanya AKP berhasil meningkatkan tiga kali lipat pendapatan

perkapita warga Turki yang awalnya 3.000 menjadi 13.000 dolar AS. Tentu untuk mencapai keberhasilan ekonomi ini tidak mudah, terlebih ditahun pertama AKP berkuasa, Turki dikenal sebagai “negara sakit” di Eropa. Terdapat tiga penyakit kronis sebelum AKP berkuasa, yaitu adanya dominasi kuat militer disegala kehidupan masyarakat, korupsi merajarela dan peperangan dengan suku Kurdi. Erdogan serta AKP paham betul bahwa untuk memperbaiki ekonomi Turki diperlukan langkah-langkah pragmatis politik. *Pertama*, terkait peran militer, Erdogan menempuh kebijakan mendekatkan Turki menjadi anggota Uni Eropa dan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO). Karena syarat utama menjadi anggota kedua organisasi tersebut, negaranya harus demokratis dan tidak ada campur tangan militer dalam segala urusan politik, artinya Turki harus bisa menciptakan militer profesional dari pada militer pretorian. *Kedua*, untuk memberantas korupsi, diawal pemerintahannya, Erdogan sangat keras terhadap dirinya serta partainya terkait korupsi, ia tidak segan-segan menghukum orang di dalam partainya apabila terlibat korupsi. Hasilnya, pemerintahan Erdogan dikenal sangat bersih serta berhasil memangkas alur birokrasi yang panjang warisan pemerintah sebelumnya. *Ketiga*, terkait suku Kurdi pemerintahan AKP mengakui hak-hak suku ini dengan memberikan kesempatan menggunakan bahasa dan budaya mereka di ruang publik, terlebih Erdogan berhasil menjamin keterwakilan politik suku Kurdi di dalam parlemen (Ikhwanul Kiram Mashuri, *Ketika Rakyat Turki “Menegur” Tuan Erdogan*, Harian Umum Republika, Tanggal 15 Juni 2015).

Dalam bidang hubungan politik internasional pemerintahan Turki dibawah AKP, menempuh strategi politik pragmatis dengan membangun komunikasi dengan semua pihak dan menjauhkan Turki dari konfrontasi langsung dengan negara lain. Ahmet Davutoglu salah satu petinggi AKP, yang pernah menjabat sebagai Menteri Luar Negeri (Menlu) dan Perdana Menteri (PM) Turki, menjelaskan politik luar negeri Turki mengambil kebijakan “nol persoalan dengan negara-negara tetangga”. Kebijakan nol persoalan perlu diambil Turki lantaran posisi dan geografis negara ini berada di Eropa, Asia, Balkan, Kaukasia dan Timur Tengah. Sebuah posisi yang menjadikan Turki sebagai zona transit antar kawasan (Ikhwanul Kiram Mashuri, *Kedigdayaan Turki Erdogani Sedang Diuji Para Teroris*, Harian Umum Republika, Tanggal 9 Januari 2017).



Politik luar negeri AKP juga menempuh konsep *Strategic Depth*, yaitu upaya transformasi kepentingan luar negeri Turki setelah tidak lagi menjadi palang pintu kebijakan anti komunisme dunia barat pasca perang dingin, Davutoglu menerjemahkan kepentingan tersebut dalam cakrawala lebih luas dengan menjadikan Turki sebagai model negara Islam demokratis yang bisa memainkan peran positifnya di Eropa, Timur Tengah dan Asia Tengah (Ahmad Dzakirin, 2012:159). Maka implikasi doktrin *Strategic Depth* terletak pada independensi dan keleluasaan Turki dalam memformulasi kepentingan dan kebijakan luar negerinya, artinya orientasi kebijakan politik luar negeri Turki tidak dimaksudkan sebagai antagonisme bagi kepentingan Dunia Barat dan Amerika Serikat. Politik luar negeri Turki telah bergeser dari startegi isolasi menuju keterlibatan aktif di panggung politik global.

Menurut Ziya Onis ( dalam M Alfian Alfian, 2015:85-86), dia menjelaskan beberapa kebijakan pragmatisme politik yang ditempuh AKP selama berkuasa, diantaranya (1) Program politik AKP dalam bidang ekonomi sangat menekankan ekonomi liberal, investasi asing, privatisasi dan regulasi ekonomi pasar terbuka. Tetapi meskipun pro liberalisasi ekonomi, AKP tetap mensepakati anggaran negara untuk *social services*. Artinya program ekonomi Turki sangat mendukung sistem pasar terbuka atau kapitalisme, dengan tetap memberikan subsidi bagi rakyat miskin. (2) Dalam bidang demokratisasi, AKP sangat menekankan konsolidasi demokrasi, melalui reformasi terkait hak-hak asasi manusia, serta terlibat dalam penguatan *civil society*. (3) Bidang keagamaan dan nilai moral AKP menekankan tatanan sekuler, nilai moral diserahkan pada norma yang berkembang dalam masyarakat, dari pada nilai-nilai Islam. Kebebasan beragama merupakan bagian dari sistem demokrasi. (4) AKP sangat menekankan pada desentralisasi dan peningkatan kapasitas pembuatan kebijakan pemerintahan lokal. (5) Kebijakan politik luar negeri, AKP memiliki orientasi politik ke barat, dengan komitmen memperjuangkan Turki masuk sebagai anggota Uni Eropa. Selain itu bersikap terbuka serta kompromistis dalam menyelesaikan berbagai masalah krusial, termasuk kasus Siprus. (6) Gaya politik AKP menekankan proses dialog serta upaya mencapai konsensus, serta memiliki kecenderungan menempatkan diri sebagai partai kanan tengah.

Terakhir pragmatisme AKP ditunjukkan dengan menawarkan platform politik yang berbeda dengan kelompok Islamis, AKP mendorong perempuan Turki

berpartisipasi dalam kehidupan politik. Erdogan mencabut peraturan diskriminasi terhadap kaum perempuan, serta fokus meningkatkan kesejahteraan ekonomi perempuan, sesuai dengan kondisi kerja dan kebutuhan perempuan. Bahkan dari 71 pendiri AKP pada tahun 2001, 12 orang diantaranya adalah perempuan separuhnya berjilbab dan separuhnya tidak. AKP juga menjadi sponsor utama terhadap amandemen konstitusi yang berhasil merumuskan pernyataan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki hak sama, serta negara bertanggungjawab mengambil tindakan untuk mewujudkan persamaan laki-laki dan perempuan. AKP menjalankan upaya pertama untuk memperbaharui hukum perdata yang diimpor dari Swis pada tahun 1926. Hukum yang sudah diperbaharui itu memberikan hak-hak baru kepada perempuan yang sudah menikah setelah tahun 2003, termasuk pembagian aset yang adil serta proses perceraian yang mudah. Pasal 41 dalam hukum baru tersebut, tertera menurunkan posisi suami sebagai kepala keluarga, dimana sebelumnya istri harus meminta persetujuan suami untuk bekerja ( Anthony Bubali, Greg Fealy dan Whit Mason, 2012:91-92). Selain reformasi hukum, AKP juga menargetkan pendidikan anak perempuan, kira-kira sejuta anak perempuan Turki berusia sekolah dasar tidak bersekolah. Dengan bekerjasama dengan UNICEF dan sukarelawan, pemerintah Turki meluncurkan kampanye “Pemudi, Ayo Bersekolah” untuk meningkatkan partisipasi perempuan di sekolah, kampanye ini dimasukkan dalam siaran TV yang dibintangi para selebritis. Itulah beberapa program politik AKP yang memiliki nuansa pragmatis, tidak menjadikan isu ideologis Islam sebagai program politik partai.

Erdogan menegaskan bahwa AKP adalah partai konservatif demokrat, sehingga AKP memiliki pandangan lebih rasional, empiris dan pragmatis. Ideologi konservatif lebih bersifat pragmatis alih-alih ideologis, konservatif AKP tercermin pada kebijakan publik yang dihasilkan misal bersikap ketat menentang tindakan-tindakan amoral di masyarakat, namun permisif terhadap kebebasan swasta diantaranya meringankan pajak bagi pengusaha besar dan membatasi peran negara terkait masalah ekonomi dan investasi (Sitaresmi S. Soekanto, 2016:107-109).

Pilihan AKP menjadi partai kanan tengah, merupakan upaya AKP untuk menjauhkan diri dari identitas Islamis. Doktrin konservatif sendiri tidak harus diasosiasikan dalam agenda kebijakan partai politik yang mengibarkan bendera

“konservatifisme” menjauhkan diri dari kebijakan progresif. Nilai konservatif AKP tidak lebih dari menghargai serta mentaati nilai-nilai spiritual dan religius, konservatif AKP menghargai perubahan. Artinya jika latar belakang ideologi spektrum kanan di Turki meliputi gabungan ekspektasi peningkatan mobilitas sosial keatas, perbaikan kesejahteraan sosial dan pertumbuhan ekonomi, maka AKP menggabungkan dengan ketertiban moral dalam masyarakat agrikultur beserta nilai-nilai tradisionalnya, dimana religiusitas memiliki pengaruh yang lebih besar dibanding parokialisme dan nasionalisme. AKP tampil dengan menggabungkan dua konsep yang menggiring kemunculan demokrasi dan konservatisme. Di Turki, konservatif itu menitikberatkan pada ketaatan religius, adat sosial dan tradisi keIslaman (Tiara Sarah Putri Sumantri, 2012:213-214). Kemenangan AKP secara berturut-turut setiap kali pemilu di Turki, tentu menjadikan partai ini sebagai partai fenomenal dipanggung politik Turki dan dunia Islam. Tentu kemenangan AKP banyak ditentukan faktor internal partai yang mampu mengemas program-program politik yang cerdas dan dibutuhkan oleh masyarakat Turki.

## **V. Kesimpulan**

Langkah pragmatisme politik dilakukan AKP karena kegagalan kaum Islamis Turki selama ini, ketika menghadapi kelompok sekuleris, lewat intervensi militer kerap kemenangan partai Islam tidak diakui, bahkan dikudeta pemerintahnya ditengah jalan.

Strategi non platform ideologis AKP dengan mengidentifikasikan diri bukan sebagai partai Islamis, tapi partai konservatif demokrat (kanan tengah). Strategi AKP fokus mengusung isu-isu substansi terkait kesejahteraan ekonomi dan integrasi Turki ke Uni Eropa.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **1. Buku**

- Alfian, M Alfian, *Militer dan Politik Turki : Pergeseran Politik dan Terpinggirnnya Militer Pasca AKP* (Bekasi : Penerbit PT Penjuru Ilmu Sehati, 2015)
- Bayat, Asef, *Pos Islamisme*. (Yogyakarta : LKIS, 2011)
- Bubalo, Anthony, Greg Fealy, Whit Mason, *PKS dan Kembarannya : Bergiat jadi Demokrat di Indonesia, Mesir dan Turki*. (Jakarta : Komunitas Bambu, 2012)
- Cetin, Muhammed, *Pencerahan Gulen Gerakan Sosial Tiada Batas* (Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia Press, 2013).
- Dzakirin, Ahmad, *Kebangkitan Post-Islamisme : Analisis Strategi AKP Turki Memenangkan Pemilu*. (Solo : Era Intermedia, 2012).
- Hidayat, Syahrul, *Mengislamkan Negara Sekuler : Partai Reffah, Militer dan Politik Elektoral di Turki*. (Jakarta : Penerbit Kencana Prenada Media Group, 2015)
- Jamil, M. Muhsin, *Membongkar Mitos Menegakan Nalar : Pergulatan Islam Liberal Versus Islam Literal*. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005).
- Romli, Asep Syamsul M, *Demonologi Islam : Upaya Barat Membasmi Kekuataan Islam*. (Jakarta : Gema Insani Press, 2000)
- Sumantri, Tiara Sarah Putri, *Demokratisasi Turki : Hubungan Sipil-Militer Tahun 2003-2011*. (Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia Press, 2012)
- Sandhiyudha, Arya, *Renovasi Negara Madani : Inspirasi Turki Untuk Indonesia* (Bekasi : Duta Media Tama, 2013).
- Soekanto, Sitaresmi S., *Strategi Pemenangan Pemilu AKP di Turki dan PKS di Indonesia Studi Perbandingan* (Depok : Universitas Indonesia Press, 2016).
- Taghian, Syarif Taghian, *Erdogan : Muadzin Istanbul Penakluk Sekulerisme Turki*. (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2011).
- Tibi, Bassam, *Islam dan Islamisme*. (Bandung : Mizan, 2016).
- Jati, Wasisto Raharjo, *Politik Kelas Menengah Muslim Indonesia* ( Jakarta : LP3ES, 2017)
- Zulfahmi, *Fethullah Gulen : Sang Inspirator Gerakan Damai Masyarakat Sipil di Turki*. (Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia Press, 2014).

## **2. Artikel dan Koran**

Ahmad Syafii Maarif, *Erdogan Vs Gulen : Bencana Politik Bagi Turki Bagian II* (Harian Umum Republika, Tanggal 9 Agustus 2016).

Muhammad Pizaro, *Balada Erdogan dan Gulen* (Harian Republika, Tanggal 21 Juli 2016)

Ikhwanul Kiram Mashuri, *Ketika Rakyat Turki “Menegur” Tuan Erdogan* (Harian Umum Republika, Tanggal 15 Juni 2015).

Ikhwanul Kiram Mashuri, *Kedigdayaan Turki Erdogan Sedang Diuji Para Teroris.* (Harian Umum Republika, Tanggal 9 Januari 2017).

## **3. Websiet**

<https://www.quareta.com/post/erdogan-akp-dan-ikhwanul-muslimin>, diakses 1 September 2017

<http://internasional.kompas.com/read/2016/07/19/11591911/fethullah.gulen.bekas.sekutu.yang.menjadi.musuh.erdogan?page=all> , diakses 12 Agustus 2017.\

## **4. Jurnal.**

Amin, Miftahul, *Pengaruh Adalet Ve Kalkinma Partisi (AKP) Dalam Trasformasi Peta Politik Di Turki* (Jurnal In Right : Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia, Vol. 4, No.1, November 2014).

Fahmi, Wan Ahmad, *Pemikiran Pasca Islamisme Dalam Konteks Gerakan Islam di Malaysia.* (UMRAN-International Journal of Islamic and Civilizational Studies (EISSN: 2289-8204)